

**THE LEGAL LAW TOWARDS CREDITORS SITUATION ON CREDIT
AGREEMENT WITH THE MORTGAGE GUARANTEE OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION**

Thalia Blessy

1687089

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country that needs sea transportation like ships which can also help the economic problem. Ships can also be used as an object of mortgage guarantee. To guarantee ships as an object of mortgage, the ships have to be registered first to get the ship registration certificate which one of the requirements is the ship must have the size of 20 m³ at the lowest. However, for the ships under construction, there is no regulation that regulates the execution towards the ships and any legal law towards creditors.

In this study, the writer uses Normative Juridical approach which is done by researching library data or secondary data as the basic material to be researched by researching on the regulations. The method of research that is used is qualitative research and the form of research is analytical descriptive research which is used to describe and to analyze the rule of law. The approach that is used is acts approach which is done by analyzing all of the acts that are related to the issue that is handled which based on the Laws of Minister No. 39 in 2017 about the Registration and The Ownership of Ships and Law of Government No. 51 in 2002 about Ships and conceptual approach. The method of collecting data that is used is library research.

According to the result of the research, it can be concluded: First. Ships that are under construction can be in force of ship mortgage infliction with condition that the construction has reach at least half of the completion. Second. The ship execution is under the regulation on HIR and RV and there is no regulation that can regulate the ship execution which is being constructed specifically. The ship execution is hardly done as the ships have their characteristics and functions which is moving around. For the ships which are being constructed is easier to be executed as the ships have not been able to put at sea.

Keywords: Ship Mortgage, Legal Law, Credit Agreement

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PADA
PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL
YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBANGUNAN**

Thalia Blessy

1687089

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang membutuhkan transportasi laut yaitu kapal yang juga dapat membantu perekonomian. kapal juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek. Untuk menjaminkan kapal sebagai objek hipotek maka harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan akta pendaftaran kapal dengan salah satu syarat kapal minimal harus berukuran paling kecil 20m³, untuk kapal yang sedang dalam proses pembangunan belum ada aturan yang mengatur mengenai proses eksekusi terhadap kapal yang sedang dalam proses pembangunan dan kepastian hukum terhadap kreditor tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*. Bahwa kapal yang sedang dalam proses pembangunan dapat dilakukan pembebanan hipotek kapal laut asalkan pembangunan yang dilakukan sudah dalam tahap penyelesaian 50%. *Kedua*, proses eksekusi kapal diatur di dalam HIR dan RV dan belum ada aturan yang mengatur proses eksekusi terhadap kapal yang sedang dalam proses pembangunan secara spesifik, untuk proses eksekusi kapal sulit dilakukan karena sebenarnya kapal memiliki sifat dan kegunaan yang bergerak dan berpindah-pindah, untuk kapal yang sedang dalam proses pembangunan akan lebih mudah karena kapal tersebut belum dapat berlayar sehingga memudahkan untuk mengeksekusi nya.

Kata Kunci : Hipotek Kapal, Kepastian Hukum, Perjanjian Kredit

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Penelitian.....	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Data	14

4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisi Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL

A. Pengertian Perjanjian Kredit.....	17
1. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUH Perdata	17
2. Tiga Jenis Unsur-Unsur Perjanjian	18
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	20
4. Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata	21
5. Pengertian Kredit	23
a. Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Kredit.....	24
b. Jenis-Jenis Yang Terdapat Dalam Kredit	25
6. Pengertian Perjanjian Kredit Menurut Hukum Perdata Indonesia.....	27
7. Tiga Fungsi Perjanjian Kredit.....	27
B. Pengertian Jaminan	28
1. Pengertian Jaminan	28
2. Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Jaminan.....	28
3. Penggolongan dan Jenis Yang Terdapat Dalam Jaminan	29
C. Pengertian Hipotek Kapal	31
1. Pengertian Jaminan Hipotek	31
2. Unsur-Unsur Dari Jaminan Hipotek	32

3. Pengertian Kapal Menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang	32
4. Pengertian Hipotek Kapal	33
5. Terhapusnya Hipotek Kapal Laut	37
D. Kepastian Hukum.....	38

BAB III PROSES PENDAFTARAN KAPAL DENGAN PEMBEBANAN

HIPOTEK KAPAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN

A. Hak Kebendaan	
1. Pengertian Hak Kebendaan.....	42
2. Ciri-Ciri Hak Kebendaan	44
3. Perbedaan Berbagai Hak Kebendaan.....	45
B. Proses Terjadinya Hipotek.....	46
1. Pendaftaran Kapal Sistem Tunggal.....	47
2. Proses Mendapatkan Status Hukum Kapal	48
3. Syarat Kapal Yang Dapat Didaftarkan di Indonesia.....	48
4. Asas Pendaftaran Kapal	53
C. Pembebanan Hipotek Kapal Laut	56
1. Pengertian Pembebanan Hipotek Kapal.....	56
2. Pengukuran Kapal.....	57
3. Permohonan Pendaftaran Hak Milik Atas Kapal.....	60
4. Tujuan dari Pendaftaran Kapal	61
D. Eksekusi Hipotek Jaminan Kapal Laut	62
1. Pengertian Eksekusi Jaminan Hipotek Kapal	62
2. Dasar Hukum Eksekusi Hipotek Kapal	63

3. Upaya Hukum Jika Debitur tidak Memenuhi Kewajibannya	64
4. Asas Yang Menghambat Eksekusi Kapal	67

BAB IV ANALISIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBANGUNAN SERTA PROSES EKSEKUSI KAPAL SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK

A. Kepastian Hukum Terhadap Peraturan Jaminan Hipotek Kapal Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017	70
B. Analisis Terhadap Peraturan Proses Eksekusi Kapal Yang Sedang Dalam Proses Pembangunan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

